

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang peneliti paparkan menggunakan pisau analisis W.N Carter tentang Mitigasi Bencana Struktural dan Non Struktural bahwa program Desa Tangguh Bencana oleh BPBD Padang Pariaman sebagai bentuk penerapan mitigasi bencana dalam pengurangan risiko bencana yang mampu beradaptasi dan menghadapi bencana. Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Padang Pariaman telah terbentuk di 15 Nagari yang dimulai pada tahun 2015. Saat ini Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman menjadi Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen dalam meningkatkan ketangguhan nagari untuk dapat terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam pengembangan program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman khususnya pada Nagari Katapiang, Nagari Sunua Barat dan Nagari Seulayat Ulakan secara non struktural telah sesuai dengan kerangka hukum atau aturan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Namun dalam aturan tersebut masih terdapat kekurangan terhadap pemahaman kerangka hukum atau kebijakan yang

memuat tentang Desa Tangguh Bencana di Nagari seperti halnya peran dari setiap instansi atau lembaga yang kurang jelas sehingga berdampak pada kurangnya tindak lanjut BPBD Padang Pariaman dan Nagari dalam program Desa Tangguh Bencana.

Kemudian dalam pembentukan kelembagaan telah terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) tingkat Kabupaten, namun pada tingkat nagari hanya memiliki Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang berasal dari masyarakat sedangkan untuk FPRB Nagari belum ada tindak lanjut. Secara umum masyarakat dikawasan pesisir pantai Nagari Katapiang, Nagari Sunua Barat dan Nagari Seulayat Ulakan telah memahami potensi kerentanan bahaya bencana tsunami. Masyarakat memang telah memahami langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan, namun edukasi terkait kebencanaan masih kurang dalam penerapannya. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan dan pendidikan terkait mitigasi bencana kepada masyarakat secara umum, walaupun BPBD Kabupaten Padang Pariaman telah memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok relawan bencana di nagari namun pelatihan kepada masyarakat sangat diperlukan agar informasi dapat diterima secara menyeluruh.

Walaupun tujuan dari Desa Tangguh Bencana agar tercapainya Nagari yang tangguh dan mandiri dalam penanggulangan bencana, namun di tingkat nagari masih belum dapat secara mandiri dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, hal ini dikarenakan terkendala akan anggaran. Sedangkan untuk aspek peringatan dini di Kabupaten Padang Pariaman sudah dapat dikatakan

cukup baik, hal ini terlihat dengan BPBD Padang Pariaman telah memiliki alat *Warning Receiver System (WRS) New Generation*. WRS New-gen ini merupakan peralatan peringatan dini ancaman risiko bencana gempa bumi dan tsunami secara *realtime* dari BMKG, kemudian untuk di Nagari BPBD Padang Pariaman telah memasang 16 titik EWS (*Early Warning System*) sebagai alat peringatan bencana tsunami ke masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara langsung untuk melakukan evakuasi.

Sedangkan untuk mitigasi secara struktural di Kabupaten Padang Pariaman masih belum memadai, terlihat dari belum tersedianya bangunan evakuasi secara vertikal yaitu *shelter*. Yang menjadi kendala oleh BPBD Padang Pariaman dalam pembangunan mitigasi secara struktural adalah anggaran yang cukup besar dalam pembangunan struktural untuk mitigasi bencana.

6.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian tentang Mitigasi Bencana Melalui Program Desa Tangguh Bencana oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji ulang terkait dokumen kebijakan program Desa Tangguh Bencana dan dijelaskan secara rinci sehingga tidak terjadi multi interpretasi dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman.

2. Perlunya peningkatan kapasitas dan sosialisasi lebih lanjut ke tingkat Nagari dalam pembentukan FPRB tingkat Nagari oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman.
3. BPBD Padang Pariaman bersama FPRB Kabupaten Padang Pariaman dan KSB Nagari harus lebih gencar mengedukasi masyarakat terkait penerapan langkah-langkah mitigasi bencana.
4. Memperbaiki dan menambah sarana prasarana di tingkat nagari guna menunjang pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman.
5. Menjalin kerja sama dengan berbagai institusi dan lembaga seperti Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar dapat mendukung pelaksanaan Mitigasi Bencana secara struktural di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga kendala seperti anggaran mendapat dukungan.

